

pengelolaan sumber daya manusia yang dimanfaatkan secara optimal agar terpusat dalam mencapai tujuan efektif dan efisien demi peningkatan mutu program Bimbingan dan Konseling (Kurniawati & Nusantoro, 2015). Guru Bimbingan dan Konseling tidak bisa menghindari tanggungjawab pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan program. Poin utama dari manajemen Bimbingan dan Konseling adalah akuntabilitas dan capaian pelaksanaan Bimbingan dan Konseling (Hunainah & Saprudin, 2018). Manajemen Bimbingan dan Konseling meliputi fungsi-fungsi, yaitu: a) perencanaan; b) pengorganisasian; c) pengarahan; d) pengawasan; e) evaluasi; f) analisis; dan g) tindak lanjut (Suherman, 2007). Dalam pengelolaan program, guru Bimbingan dan Konseling harus memiliki kompetensi yang tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 27 Tahun 2008, yakni: a) mampu merancang program; b) mengimplementasikan program; c) menilai proses dan hasil kegiatan (Ahmad Faris Al Anshari, 2019). Keterampilan guru Bimbingan dan Konseling dalam menyusun program Bimbingan dan Konseling sangat vital karena mempengaruhi keberhasilan layanan serta memberikan arah, tujuan dan strategi yang jelas (Arsini et al., 2023).

Hunainah & Saprudin (2018) menjelaskan pembinaan manajemen Bimbingan dan Konseling berada pada pimpinan institusi yang memegang kunci yang diturunkan melalui coordinator Bimbingan dan Konseling yang memiliki kemampuan manajerial yang baik. Tanggung jawab pelaksanaan program layanan Bimbingan dan Konseling hendaknya dilimpahkan kepada guru Bimbingan dan Konseling sebagai personal yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor yakni lulusan sarjana (S1) Bimbingan dan Konseling atau mengikuti PPK atau PPG BK. Sehingga pelaksanaan Bimbingan dan Konseling dapat berjalan optimal (Khairiah et al., 2017).

Selanjutnya program Bimbingan dan Konseling harus disosialisasikan pada seluruh *stakeholder* yang berkepentingan sebagai bentuk dukungan system (Asiah et al., 2016). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu dan layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah (Sumitri et al., 2017). Selain itu, forum Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) diharapkan mampu berpartisipasi meningkatkan kompetensi guru Bimbingan dan

Konseling dalam pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah yang mengacu pada Standar Pengembangan MGBK dan Standar Operasional MGBK (Sulistyowati, 2018). Selanjutnya manajemen Bimbingan dan Konseling perlu ditopang oleh kepemimpinan yang kokoh (Putranti et al., 2021). Kepemimpinan yang dimaksud adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab sekaligus personil penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di sekolah (Hasmidar dalam Putranti et al., 2021). Nurihsan & Sudianto (2005) menjelaskan tugas kepala sekolah yang berkaitan dengan pelaksanaan program Bimbingan dan Konseling ialah: a) mengkoordinasikan seluruh kegiatan pendidikan dan bimbingan; b) menyediakan sarana dan prasarana; c) memberikan kemudahan terlaksananya program Bimbingan dan Konseling; d) melakukan supervise pada layanan Bimbingan dan Konseling; e) menetapkan koordinator Bimbingan dan Konseling; dan f) mengadakan kerjasama dengan instansi lain terkait layanan Bimbingan dan Konseling (Putranti et al., 2021). Kepala sekolah menjadi personil penting dalam dukungan system layanan Bimbingan dan Konseling untuk mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan siswa (Khairiyah et al., 2022).

Namun fakta dilapangan, mekanisme manajemen Bimbingan dan Konseling yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 111 tahun 2014 dan POP BK 2016 tidak berjalan dengan sistematis dan runtut sebagaimana mestinya. Guru Bimbingan dan Konseling sering mengabaikan bahkan tidak membuat laporan Bimbingan dan Konseling sebagai bentuk akuntabilitas dan penemuan aspek manajemen Bimbingan dan Konseling (Kurniawati & Nusantoro, 2015). Guru Bimbingan dan Konseling hanya sebatas membuat laporan pelaksanaan program tanpa melaksanakan prosedur, akhirnya laporan hanya sebatas formalitas pertanggungjawaban pada kepala sekolah dan pengawas. Selain itu, guru Bimbingan dan Konseling tidak membuat pelaporan dengan runtut, sistematis dan jelas terkait terlaksananya program Bimbingan dan Konseling (Kurniawati & Nusantoro, 2015). Sedangkan pelaporan merupakan cara bagi guru Bimbingan dan Konseling untuk melakukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program layanan yang telah dilakukan dan sebagai bentuk akuntabilitas (Sugiyono & Nurul, 2019). Sehingga, pelaporan ini merupakan proses lanjutan atau bentuk deskripsi dari evaluasi hasil dan proses yang memberikan informasi pada seluruh

stakeholder tentang keberhasilan dan kekurangan dari program Bimbingan dan Konseling (Sugiyono & Nurul, 2019). Padahal sistematika pelaporan menjadi acuan untuk melaksanakan tahap evaluasi dan tindak lanjut program Bimbingan dan Konseling agar berjalan efektif dan efisien (Dinkmeyer & Caldwell, 1970). Pelaporan dibuat berdasarkan hasil dari proses pengumpulan, penganalisisan dan penginterpretasian informasi untuk menghasilkan data yang valid atas pelaksanaan program Bimbingan dan Konseling, sehingga pelaporan harus dibuat secara komprehensif berbasis data (M.Fatchurahman, 2019). Oleh karena itu dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat membantu guru Bimbingan dan Konseling menyusun pelaporan program Bimbingan dan Konseling yang benar dan baik, dibuat sesuai sistematika yang terstruktur berdasarkan aturan Permendikbud Nomor 111 tahun 2014 dan POP BK tahun 2016.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur/kepastakaan (*library research*) sebagai bagian penelitian pendidikan yang berkontribusi secara signifikan pada teori dan praktik pendidikan (Gay et al., n.d.). Kajian literatur dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang berpijak pada pengkajian kritis terhadap bahan yang relevan (M. Sari & Asmendri, 2020). Pada kajian literatur mendorong peneliti berupaya untuk secara sistematis mengutip penelitian sebelumnya yang terkait dalam kerangka masalah yang dibahas dalam studi, selain itu peneliti harus mengidentifikasi kesenjangan literatur saat ini (Houser, 2020). Houser (2020) menjelaskan biasanya sumber yang digunakan adalah sumber primer terdiri dari buku dan tinjauan literatur harus menyeluruh dan komprehensif untuk mengembangkan argumen penelitian. Hadi & Afandi (2021) menegaskan pembahasan kajian literatur bukan hanya meninjau pendahuluan, tapi analisis mendalam dan mendetail yang bertujuan untuk memperluas kajian yang dilakukan, mengkaji ulang literatur yang telah dipublikasi. Peneliti pun harus melakukan evaluasi dan pengembangan sampai kajian literatur memiliki nilai intelektual yang tinggi. Creswell dalam Hadi & Afandi (2021) menegaskan bahwa tujuan kajian literatur adalah memberikan informasi dengan menghubungkan penelitian dengan literatur yang relevan untuk mengisi kekosongan pembahasan penelitian sebelumnya. Penyusunan kajian literatur bertujuan menghimpun data dalam wujud teori dalam penelitian, artikel, bulletin, buku, naskah

artikel dan dokumen lainnya. Zeed dalam R. K. Sari (2021) menjelaskan ada 4 tahapan kajian literatur, yakni: a) menyiapkan alat perlengkapan; b) menyusun bibliografi kerja; c) mengatur waktu; d) membaca dan membuat catatan. Sementara Mirshad dalam R. K. Sari (2021) menjabarkan 4 tahapan, yakni: a) mencatat semua temuan mengenai masalah penelitian; b) memadukan segala temuan; c) menganalisis temuan dari berbagai bacaan; d) memberikan gagasan kritis dalam hasil penelitian.

Pemilihan data menggunakan bantuan aplikasi *Publish or Perish 8* (PoP8). Penelitian ini menggunakan tiga database untuk pencarian: *Google Scholar*, *ResearchGate* dan *Garuda*. Pencarian PoP8 menghasilkan beberapa artikel yang disimpan dalam aplikasi Mendeley. Kriteria inklusi artikel dalam penelitian ini yakni artikel penelitian dari tahun 2015-2024, artikel yang diterbitkan dalam jurnal dan ditulis lengkap dalam Bahasa Indonesia dan serta menggunakan desain penelitian kuantitatif dan kualitatif. Proses pencarian artikel menggunakan kata kunci untuk judul review literatur sistematis, seperti "manajemen Bimbingan dan Konseling", "pelaporan dan evaluasi manajemen Bimbingan dan Konseling", dan "sistematika pelaporan dan evaluasi manajemen Bimbingan dan Konseling". Data yang digali dari artikel meliputi nama penulis, tahun, nama jurnal, negara, tujuan, kerangka teori atau model, konseptualisasi, pendekatan metodologis, sampel atau partisipan, dan hasil.

3. Hasil dan Pembahasan

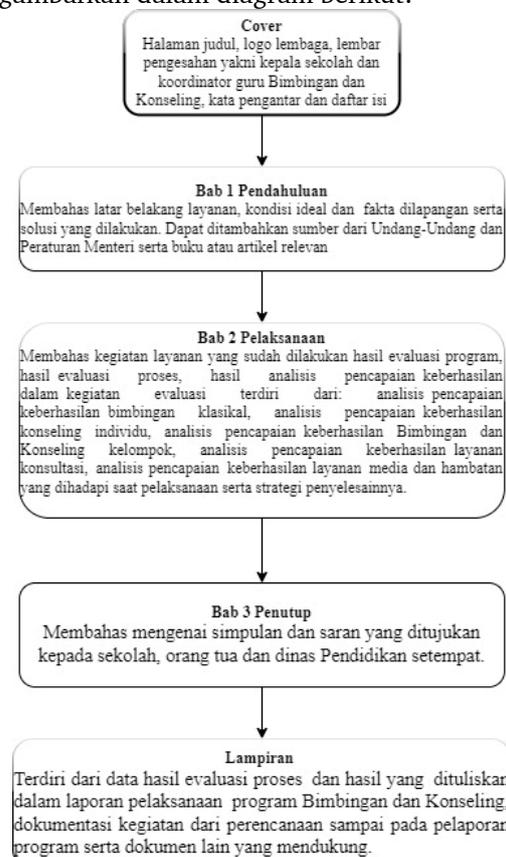
Pelaporan layanan Bimbingan dan Konseling adalah salah satu aspek penting dalam manajemen Bimbingan dan Konseling (Yusuf & Nurihsan, 2016). Pelaporan berasal dari kata "lapor" dan mendapat akhiran "an" yang berarti segala sesuatu yang dilaporkan atau pemberitahuan informasi. Laporan digunakan sebagai bentuk tanggungjawab yang tertulis atas sesuatu penugasan (Sugiyono & Nurul, 2019). Guru Bimbingan dan Konseling harus menguasai kemampuan manajerial yang baik terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan. Seluruh elemen dalam manajemen Bimbingan dan Konseling saling berpengaruh dan saling terkait satu dengan lainnya (Suherman, 2007). Dalam konteks Bimbingan dan Konseling pelaporan bermakna pemberitahuan informasi atas hasil evaluasi, analisis dan tindak lanjut layanan Bimbingan dan Konseling (Yusuf, 1982). Setelah guru Bimbingan dan Konseling melaksanakan semua rangkaian

program, merupakan kewajiban dan bentuk tanggungjawab guru Bimbingan dan Konseling untuk melaksanakan pelaporan layanan program yang sudah terlaksana. Hal ini sering dilupakan oleh guru Bimbingan dan Konseling padahal pelaporan program akan membantu umpan balik penyusunan program selanjutnya (M.Fatchurahman, 2019). Pelaporan layanan program Bimbingan dan Konseling sudah tertuang dalam Permendiknas nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor dimana penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan layanan adalah bentuk kompetensi yang harus dimiliki guru Bimbingan dan Konseling (Permendiknas, 2008). Laporan layanan ini disusun berdasarkan hasil proses yang sistematis dari pengumpulan, penganalisisan dan penginterpretasian informasi dalam rangka menghasilkan data yang valid dan reliabel tentang pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling (M.Fatchurahman, 2019). Laporan layanan Bimbingan dan Konseling berupa akuntabilitas atas keberhasilan, kemajuan, hambatan maupun status yang diperoleh, sehingga bukan hanya progress kemajuan yang dicantumkan, namun progress hambatan dalam pelaksanaan layanan pun harus dicantumkan dalam laporan (M.Fatchurahman, 2019). Adapun tujuan dan manfaat pelaporan layanan program Bimbingan dan Konseling yakni: a) melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan program layanan Bimbingan dan Konseling; b) melaporkan hasil analisis pelaksanaan program Bimbingan dan Konseling; c) melaporkan hasil tindak lanjut pelaksanaan program tahunan, semester; d) laporan memberi gambaran seperti kondisi umum, kondisi factual, masalah yang timbul dan alternatif solusi jangka pendek dan panjang; e) komponen laporan layanan Bimbingan dan Konseling terdiri dari jenis layanan yang dilakukan, waktu pelaksanaan, sasaran kegiatan, hasil yang dicapai dan factor penunjang serta penghambat pelaksanaan layanan; f) menyediakan mekanisme umpan balik pada *stakeholder*; g) memberikan jaminan akuntabilitas bahwa layanan Bimbingan dan Konseling telah memenuhi prinsip efektif dan efisien (Gysbers & Henderson, 2012).

Sugiyo & Nurul (2019) menjabarkan langkah penyusunan laporan pelaksanaan program Bimbingan dan Konseling terdiri dari 3 tahap, yakni: a) Tahap persiapan, yakni guru Bimbingan dan Konseling menetapkan berbagai hal yang akan dilaporkan seperti informasi yang akan dilaporkan, alasan mengapa kegiatan harus dilaporkan, penyusunan instrument laporan dan waktu pelaporan; b) Tahap pengumpulan dan

penyajian data, yakni guru Bimbingan dan Konseling mengumpulkan data dari semua layanan yakni bidang pribadi, social, belajar dan karir serta dukungan system. Data yang disajikan meliputi keterlaksanaan dan ketercapaian tujuan program dan hambatan dalam pelaksanaan; c) Tahap penulisan laporan, yakni masuk dalam penulisan laporan. Farozin dalam Sugiyo & Nurul (2019) menyatakan dalam penyusunan laporan terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan, yakni sistematika laporan hendaknya logis, mudah difahami dan lugas, deskripsi laporan hendaknya memperhatikan kaidah penulisan dan kebahasaan dan pelaporan dilampirkan secara akurat dan tepat waktu.

Selanjutnya sistematika dan isi laporan pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling tertuang dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 yang terdiri dari 3 bab besar, yaitu: a) bab pendahuluan terdiri dari latar belakang dan tujuan penyusunan laporan; b) bab pelaksanaan terdiri dari uraian komponen program beserta layanan yang dilakukan; dan c) penutup yang terdiri dari simpulan akhir, keberhasilan, hambatan dan saran kepada seluruh *stakeholder*. Struktur laporan pelaksanaan program Bimbingan dan Konseling yang tercantum dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 yang digambarkan dalam diagram berikut:



Gambar 1. Alur Penyusunan Laporan Layanan Bimbingan dan Konseling

Lampiran yang dicantumkan harus disertai dengan dokumen penunjang seperti laporan konseling individual yang telah dilakukan dalam jangka semester atau setahun beserta kepuasan konseli terhadap layanan konseling individual, laporan konseling kelompok beserta kepuasan konseli terhadap layanan konseling kelompok, laporan bimbingan kelompok beserta kepuasan konseli terhadap layanan bimbingan kelompok serta laporan bimbingan klasikal dan kelas besar dan guru Bimbingan dan Konseling harus melampirkan berbagai dokumen seperti rencana pelaksanaan layanan (Kemendikbud, 2016).

Saat semua laporan pelaksanaan sudah dilampirkan dan dijadikan sebuah laporan, maka akan ditindak lanjut kepada kepala sekolah sebagai kepala manajemen sekolah dan kepada *stakeholder* yang terkait dengan pelaksanaan program Bimbingan dan Konseling. Pelaporan ini sejatinya mendorong evaluasi lebih lanjut terkait program Bimbingan dan Konseling karena guru Bimbingan dan Konseling akan mampu melihat sejauh mana efektifitas layanan yang telah dilaksanakan (Kurniawati & Nusantoro, 2015). Evaluasi program Bimbingan dan Konseling mendorong agar guru Bimbingan dan Konseling memahami materi dan gagasan yang telah dilakukan dan mengetahui sejauh mana keberhasilan tersebut (Asiah et al., 2016). Selain itu dengan adanya pelaporan, mendorong terjadinya supervise yang dimaksudkan untuk melihat hambatan apa yang terjadi dilapangan (Asiah et al., 2016). Dengan adanya pelaporan, maka tindak lanjut evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif (Supriyanto & Handaka, 2016). Laporan layanan secara komprehensif meliputi layanan dasar, perencanaan individual, layanan responsive dan dukungan system. Selain itu, rencana pelaksanaan layanan dan laporan setiap layanan harus dilampirkan dalam laporan Bimbingan dan Konseling ini (Azizah et al., 2017). Seringkali guru Bimbingan dan Konseling enggan menambahkan lampiran layanan kegiatan karena administrasi yang kurang baik, sehingga guru Bimbingan dan Konseling harus menata setiap lampiran layanan yang telah dilakukan sebagai bukti pendukung telah dilaksanakannya layanan tersebut.

Penerapan pelaporan program Bimbingan dan Konseling yang baik dengan menerapkan

sistematika yang runtut dan penyusunan yang terstruktur akan memudahkan guru Bimbingan dan Konseling, kepala sekolah dan *stakeholder* untuk melihat secara bersama efektifitas program selama satu semester atau satu tahun, selain itu memudahkan untuk melakukan evaluasi komprehensif di setiap layanan (Siregar, 2017). Oleh karena itu peran sosialisasi dan pelatihan oleh MGBK dalam pelatihan penyusunan program Bimbingan dan Konseling khususnya pelaporan program Bimbingan dan Konseling menjadi sangat penting (Sulistyowati, 2018). Sehingga diharapkan dengan pelatihan yang diselenggarakan oleh MGBK menjadikan guru Bimbingan dan Konseling memiliki kompetensi yang terdiri dari keterampilan, sikap dan pengetahuan terkait program Bimbingan dan Konseling dari perencanaan sampai pada tindak lanjut (Awalya et al., 2022). Sehingga dengan dukungan sistem yang baik dari MGBK, kepala sekolah sampai dinas pendidikan, maka program Bimbingan dan Konseling dapat menjadi ujung tombak dari program sekolah (Ulfah, 2022).

4. Simpulan dan Saran

Pelaporan program Bimbingan dan Konseling sering kali tidak dilakukan oleh guru Bimbingan dan Konseling. Sedangkan pelaporan adalah bukti akuntabilitas dan profesionalitas guru Bimbingan dan Konseling yang dibutuhkan informasinya oleh *stakeholder* yang berkaitan dengan berjalannya program Bimbingan dan Konseling serta kepala sekolah sebagai penanggungjawab program Bimbingan dan Konseling. Banyak guru Bimbingan dan Konseling yang belum memiliki kompetensi dalam menyusun laporan program Bimbingan dan Konseling sesuai dengan Permendikbud nomor 111 tahun 2014 dan POP BK tahun 2016. Padahal kompetensi pelaporan ini harus dimiliki oleh guru Bimbingan dan Konseling sesuai dengan Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang standar kompetensi dan kualifikasi guru Bimbingan dan Konseling. Oleh karena itu untuk mewujudkan kompetensi yang optimal dalam penyusunan pelaporan program Bimbingan dan Konseling, maka dibutuhkan dukungan system yang baik.

MGBK sebagai forum organisasi akademisi yang mewadahi pengembangan riset dan inovasi serta pelatihan untuk guru Bimbingan dan Konseling harus mengambil peran yang besar dalam peningkatan kompetensi guru Bimbingan dan Konseling. Dimana MGBK dapat memberikan pelatihan *workshop* mengenai penyusunan pelaporan program Bimbingan dan Konseling, *workshop* ini dapat mencakup guru

Bimbingan dan Konseling 1 kabupaten atau 1 kota. Langkah ini sangat efektif apabila dilakukan oleh MGBK.

Dinas Pendidikan yang diwakilkan oleh pengawas Pembina sekolah memiliki peran yang signifikan dalam pelaksanaan manajemen program Bimbingan dan Konseling, dimana Bimbingan dan Konseling akan selalu dipandang sebagai ujung tombak sekolah. Oleh karena itu pengawas Pembina sekolah sebagai perwakilan dinas Pendidikan hendaknya untuk memberikan arahan baik konsep maupun teknis terkait pelaksanaan program Bimbingan dan Konseling dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaporan program. Tentu hal ini akan berpengaruh pada pengembangan potensi siswa yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan Pendidikan.

Kepala Sekolah memegang peran sangat sentral sebagai pemimpin manajerial dalam sekolah. Kepala sekolah harus mendorong agar program Bimbingan dan Konseling yang dilaksanakan guru Bimbingan dan Konseling harus selaras dengan tujuan, visi dan misi sekolah. Selain itu pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah dari mulai perencanaan sampai pada pelaporan sangat penting dilakukan agar layanan Bimbingan dan Konseling berjalan dengan optimal.

Orang tua siswa dan masyarakat sekolah memiliki peran yang tidak terpisahkan dalam bagian *stakeolder* program Bimbingan dan Konseling, oleh karena itu tentu utamanya orang tua siswa harus mengetahui program Bimbingan dan Konseling dan capaian apa saja yang sudah dilakukan. Orang tua siswa perlu mengetahui layanan Bimbingan dan Konseling karena sangat erat kaitannya dengan pengembangan potensi anak yang menjadi tujuan dasar orang tua dalam pendidikan. Selain itu masyarakat di lingkungan sekolah turut memberikan bantuan upaya dalam menyukseskan program Bimbingan dan Konseling utamanya mengevaluasi capaian yang sudah dilaporkan.

Daftar Pustaka

Ahmad Faris Al Anshari. (2019). Manajemen Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (Studi Deskriptif pada Sekolah Menengah Kejuruan). *Visipena Journal*, 10(1), 66–77. <https://doi.org/10.46244/visipena.v10i1.491>

Arsini, Y., Yamani, R., Saragih, S. N., & Prasetya, Y. (2023). Keterampilan Konselor Dalam Menyusun Program Manajemen Bimbingan. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling*,

1(3), 1107–1112. <https://doi.org/https://doi.org/10.47233/jpdk.v1i3>

Asiah, N., AR, M., & Bahrin. (2016). Manajemen Guru Bimbingan dan Konseling di SMPN 1 Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan*, 45–53.

Awalya, A., Indriyanti, D. R., Arinata, F. S., & ... (2022). Peningkatan Kompetensi Kolaborasi Konselor Sekolah Melalui Program Pelatihan di Musyawarah Guru Bimbingan Dan Konseling (MGBK) Kabupaten Semarang. *Journal of ...*, 2(1), 27–31. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JCE/article/view/52290%0Ahttps://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JCE/article/download/52290/21495>

Azizah, F., Ginting, H. F. B., & Utami, R. S. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Layanan Bimbingan Dan. *Prosiding Seminar Bimbingan Dan Konseling*, 1(1), 177–188. <http://pasca.um.ac.id/conferences/index.php/snbk/article/view/219>

Dinkmeyer, D., & Caldwell, E. (1970). *Developmental Counseling & Guidance: A Comprehensive School Approach* (W. F. Johnson (ed.); 1st ed.). McGraw-Hill.

Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, P. W. (n.d.). *Educational Research Competencies for Analysis and Application* (J. W. Johnston (ed.); 10th ed.). Pearson Education, Inc.

Gysbers, N. C., & Henderson, P. (2012). Developing & managing your school guidance & counseling program, 5th ed. In *Developing & managing your school guidance & counseling program, 5th ed.*

Hadi, N. F., & Afandi, N. K. (2021). Sultra Educational Journal (Seduj) Literature Review is A Part of Research. *Sultra Educational Journal (Seduj)*, 1(3), 64–71. <http://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sedujhttp://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/seduj>

Houser, R. A. (2020). *Counseling and Educational Research Fourth Edition* (R. A. Houser (ed.); 4th ed.). Sage Publication.

Hunainah, & Saprudin, U. (2018). *Manajemen Bimbingan dan Konseling* (2nd ed.). Rizqi Press.

Kemendikbud. (2016). Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Sekolah Dasar. *Academia.Edu*, 1, 172.

Khairiah, Yusrizal, & Khairuddin. (2017). Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Pengelolaan Program Layanan Bimbingan dan Konseling di SMP

- Negeri 17 Kota Banda Aceh. *Jurnal Administrasi Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(2), 110–115.
- Khairiyah, K., Mardes, S., Oktary, D., Cahyaningsih, R., Aprilianty, E. O., Dwitammi, N. A., & Rahmadani, N. (2022). Dukungan Sistem dan Pengembangan Program Bimbingan dan Konseling. *Journal on Teacher Education*, 4(2), 200–212.
- Kurniawati, I., & Nusantoro, E. (2015). Pemahaman Guru BK Terhadap Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling Theory and Application: IJGC*, 4(1), 15–21. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jbk>
- M.Fatchurahman. (2019). *Program Bimbingan Dan Konseling*. 53(9), 1–121.
- Nurihsan, A. J., & Sudianto, A. (2005). *Manajemen Bimbingan & Konseling di SMA* (A. J. Nurihsan & A. Sudianto (eds.); 1st ed.). PT Grasindo.
- Permendikbud. (2014). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. *Republik Indonesia*, 1–45.
- Permendiknas. (2008). Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional*, 11(75), 23–26. http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe_de_Desarrollo_Social_2020.pdf<http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/44540/44554>
- Putranti, D., Fithroni, F., & Kusumaningtiyas, D. (2021). Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi Program Bimbingan Dan Konseling di Sekolah. *Jurnal Prakarsa Paedagogia*, 3(2). <https://doi.org/10.24176/jpp.v3i2.5745>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Sari, R. K. (2021). Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia. *Jurnal Borneo Humaniora*, 4(2), 60–69. https://doi.org/10.35334/borneo_humaniora.v4i2.2249
- Siregar, S. W. (2017). Model dan Rancangan Evaluasi Program Bimbingan Dan Konseling. *Hikmah*, 11(2), 271290. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Hik/article/view/747>
- Sugiyono, & Nurul. (2019). *Modul 3 Perencanaan dan Evaluasi Layanan Bimbingan dan Konseling Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. 119–148.
- Suherman, U. (2007). *Manajemen Bimbingan dan Konseling* (U. Suherman (ed.). Madani Production.
- Sulistyowati, M. D. R. (2018). Pengelolaan MGBK Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Bimbingan Dan Konseling SMA/MA. *Media Manajemen Pendidikan*, 1(2), 169. <https://doi.org/10.30738/mmp.v1i2.3120>
- Sumitri, F., Rohiat, & Zakaria. (2017). Pengelolaan Program Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Menengah Atas. *Manajer Pendidikan*, 11(6), 504–510.
- Supriyanto, A., & Handaka, I. B. (2016). Profesionalisme Konselor : Evaluasi Program Bimbingan Dan Konseling Komprehensif Di Sekolah. *Seminar Nasional LP3M (Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, Dan Penjaminan Mutu)*, November, 81–89.
- Ulfah, U. (2022). Pelatihan Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling untuk Meningkatkan Layanan Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 6, 237–246. <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/20244%0Ahttps://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/download/20244/14048>
- Yusuf, S. (1982). *Karakteristik, Kompetensi dan Peran Konselor*.
- Yusuf, S., & Nurihsan, A. J. (2016). *Landasan Bimbingan & Konseling* (9th ed.). Remaja Rosdakarya.